



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



TAHUN
2025

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. LKj Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKj Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKj ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, Januari 2026

**Pt. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produktivitas pertanian dengan target pertumbuhan sebesar **7,29 Ton/ha** yang dihitung berdasarkan total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025, produktivitas pertanian yang diukur dari angka pertumbuhan komoditi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura mencapai angka **6,91 Ton/ha**, dengan demikian capaian ini belum mencapai target yang ditentukan dengan persentase capaian terhadap target sebesar **94,79%**.
- Dibandingkan dengan capaian target produktivitas pertanian tahun 2024 sebesar **7,02 Ton/ha**, terjadi penurunan sebesar **1,57%**.

2. Peningkatan populasi peternakan.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produksi peternakan dengan target sebanyak **29.950 Ton** yang dihitung melalui Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator

kinerja ini adalah 1 (satu) tahun.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024, Produksi peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka **30.360 Ton** atau sebesar **101,37%** dari target yang ditentukan. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target.
- Dibandingkan capaian produksi peternakan tahun 2024 sebanyak **28.054,03 Ton**, terjadi peningkatan sebesar **1,46%**.

3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan target pencapaian angka **90,43**. Skor PPH konsumsi merupakan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (Empat) Program, yakni: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 mencapai angka **92,3** atau persentase realisasi sebesar **102.07%** terhadap pencapaian target. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target

yang ditentukan.

- Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2024 sebesar **90,3**, terjadi peningkatan sebesar **2.21%**.

4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

- Capaian sasaran diukur melalui indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dengan target angka penilaian dalam RENSTRA sebesar **81,69**. Nilai RB merupakan angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.
- Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2025 tidak diketahui karena adanya perubahan peraturan dari pusat, sehingga tidak lagi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

188.4/020/Kpts/Dpkp-I Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.

- Persentase ketercapaian terhadap target tahun 2025 terhadap capaian indikator Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2024 **tidak dapat diperbandingkan**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah antisipasi sebagai tindak lanjut pengendalian dari risiko yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun tantangan yang teridentifikasi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Kondisi agroklimat yang kurang mendukung, khususnya anomali cuaca dan distribusi curah hujan yang tidak merata, berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan utama;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian, termasuk irigasi, alat mesin pertanian, serta ketersediaan input produksi yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh sentra produksi;
3. Alih fungsi dan degradasi lahan pertanian, terutama pada lahan marginal pascatambang, yang memengaruhi daya dukung lahan terhadap peningkatan hasil per hektar;
4. Penerapan teknologi budidaya yang belum optimal, baik dari sisi adopsi inovasi oleh petani maupun intensitas pendampingan teknis di lapangan;
5. Ketergantungan terhadap pasokan pakan dari luar daerah, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan peningkatan populasi apabila terjadi fluktuasi harga dan distribusi;
6. Ancaman penyakit hewan menular, yang memerlukan kewaspadaan dan

- penguatan sistem kesehatan hewan secara berkelanjutan;
7. Keterbatasan kapasitas kelembagaan peternak, khususnya dalam manajemen usaha dan penerapan standar budidaya yang efisien, meskipun capaian target tetap berhasil diraih;
 8. Perubahan pola konsumsi masyarakat yang belum merata, terutama di wilayah tertentu yang masih bergantung pada satu jenis pangan pokok;
 9. Keterbatasan akses dan kontinuitas ketersediaan pangan lokal, khususnya pangan sumber protein dan pangan segar di wilayah kepulauan;
 10. Perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, agar peningkatan skor konsumsi pangan beragam dapat dipertahankan dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Pohon Kinerja	1
1.2. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	2
1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	5
1.4. Isu-isu Strategis	18
1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	19
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	31
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	31
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	32
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	33
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)	35
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	42
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	43
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2025	43
3.2. Efisiensi Anggaran	89
3.3. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025	91
3.4. Inovasi	92
3.5. Penghargaan	94
3.6. Crosscutting.....	96

BAB IV. Penutup	97
4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Rekomendasi.....	99
4.3. Rencana Aksi	100
LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	20
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	29
Tabel I.3.	Perbandingan Anggaran Tahun 2024-2025	30
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026	32
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	32
Tabel II.3.	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	33
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025.....	36
Tabel II.5.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025	36
Tabel II.6.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025	38
Tabel II.7.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	38
Tabel II.8.	Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2025	40
Tabel II.9.	Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025	40
Tabel III.1.	Skala Nilai Perangkat Kinerja	43
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2025	44
Tabel III.3.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1).....	46
Tabel III.4.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 1).....	47

Tabel III.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025 (Sasaran I)	56
Tabel III.6.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)	63
Tabel III.7.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 2).....	63
Tabel III.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025 (Sasaran 2)	66
Tabel III.9.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)	70
Tabel III.10.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 3).....	71
Tabel III.11.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025 (Sasaran 3)	76
Tabel III.12.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	82
Tabel III.13.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 4).....	83
Tabel III.14.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025	90
Tabel III.15.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
Gambar I.2.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	18
Gambar II.1.	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
Gambar III.1.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran I).....	57
Gambar III.2.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	59
Gambar III.3.	Dokumentasi Program Perizinan Usaha Pertanian	60
Gambar III.4.	Dokumentasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	61
Gambar III.5.	Dokumentasi Program Penyuluhan Pertanian	62
Gambar III.6.	Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Sasaran 2)	67
Gambar III.7.	Dokumentasi Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	69
Gambar III.8.	Dokumentasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	77
Gambar III.9.	Dokumentasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	78
Gambar III.10.	Dokumentasi Program Penanganan Kerawanan Pangan	80
Gambar III.11.	Dokumentasi Program Pengawasan Keamanan Pangan	81
Gambar III.12.	Dokumentasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	86
Gambar III.13.	Bagan <i>Crosscutting</i> Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	96

BAB I

Pendahuluan

BAB I Berisi :

1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu-Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. Pohon Kinerja

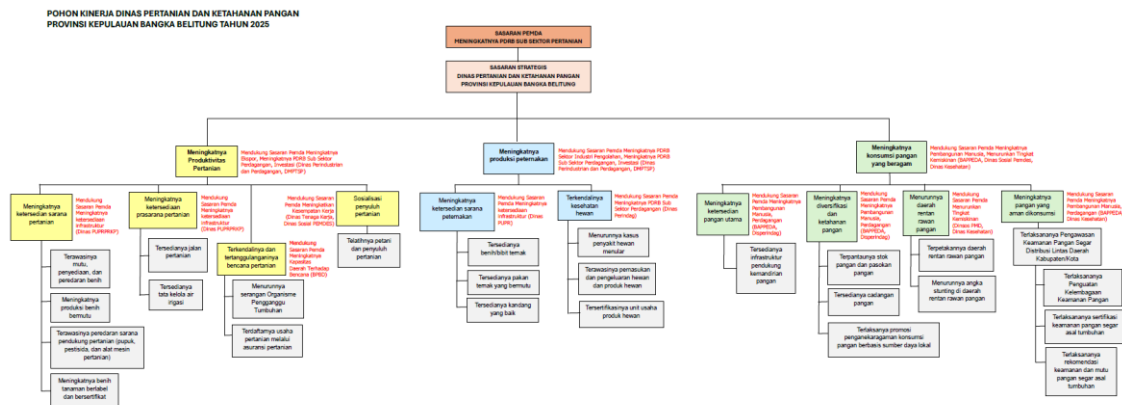
Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis

dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Di dalam pohon kinerja kita dapat melihat *crosscutting* kaitan/hubungan dengan Instansi lain baik itu instansi vertikal maupun antar perangkat daerah.

Secara teoritis, konsep pohon kinerja mengadopsi konsep model logis (*logic model*) yang merupakan salah satu pendekatan perencanaan yang sering digunakan untuk menganalisis proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai outcome/kinerja yang diinginkan. Pohon Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Pohon Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



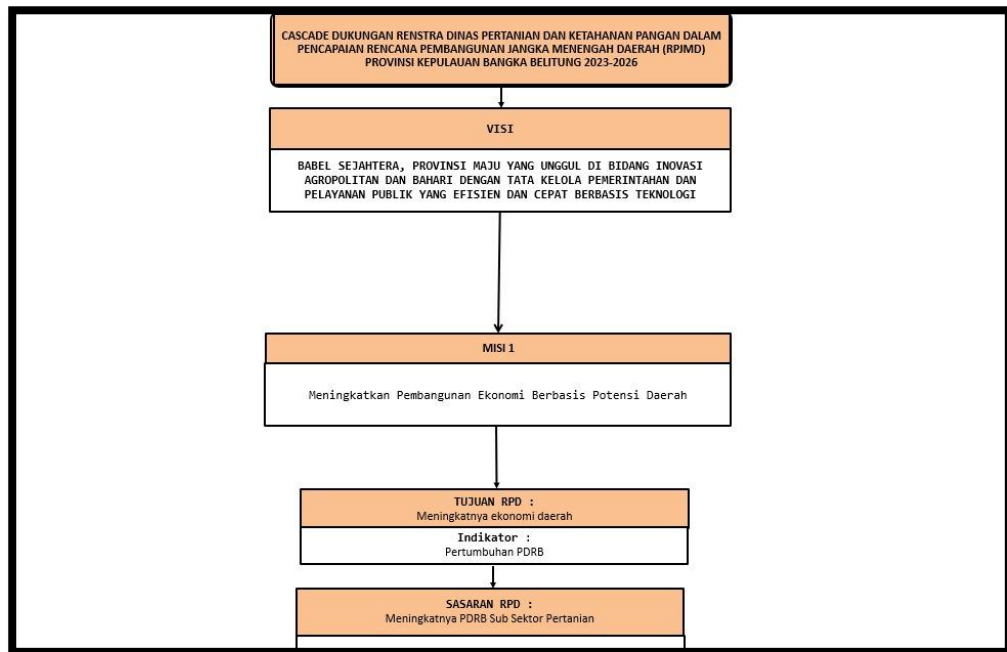
Ket: Pohon Kinerja Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/PohonKinerja2025DPKP

1.2. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

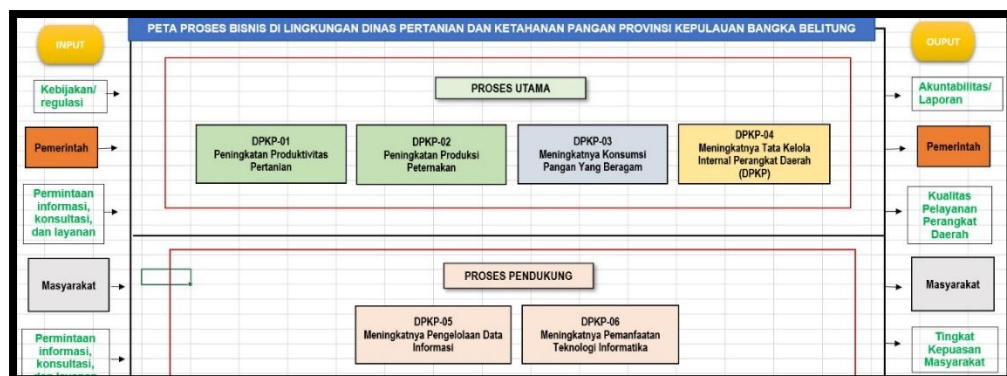
Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022

tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1
Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

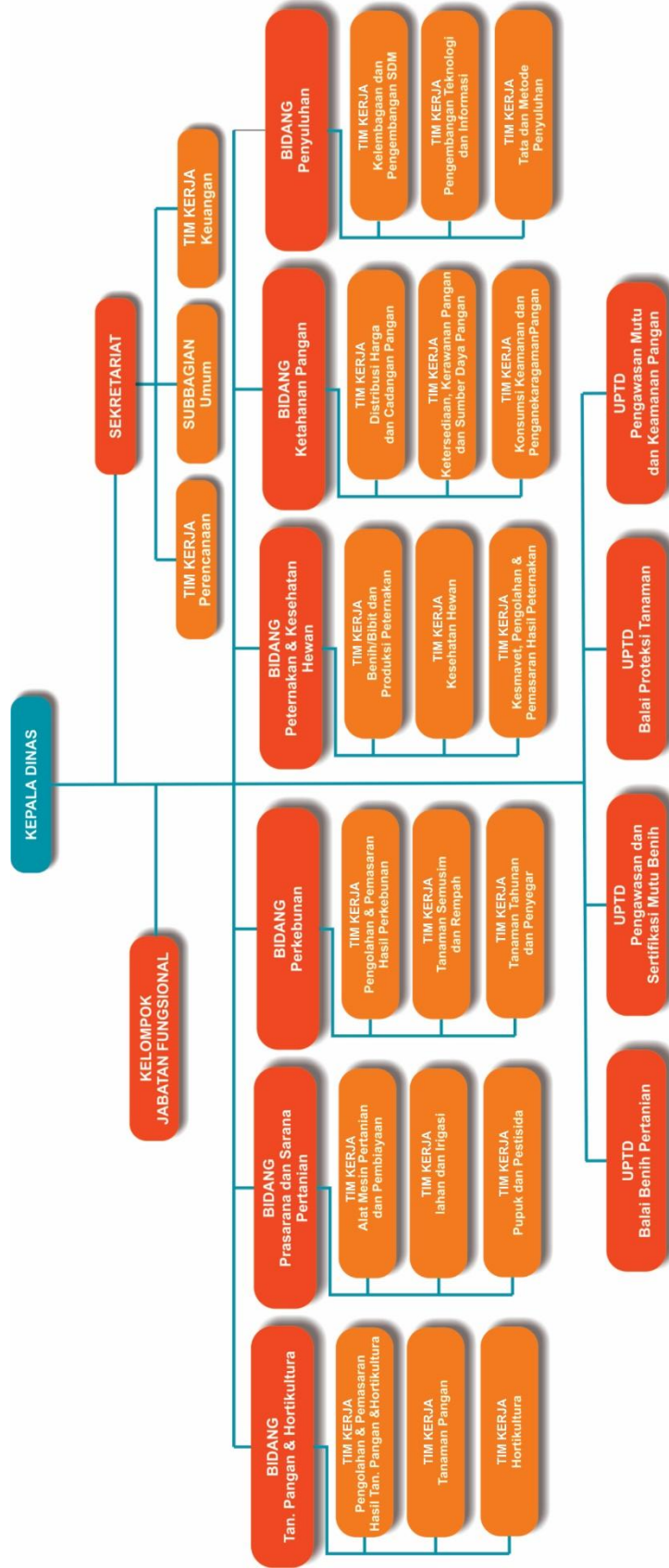


Ket: Cascading Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/CascadeDPKP



Ket: Peta Proses Bisnis Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/ProbisDPKP

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2025**



1.3. Tugas dan Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi

- keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
 - h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTD;
 - i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
 - j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
 - k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
 - l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian dan bidang pangan;
 - m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
 - n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
 - o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah

- Kabupaten/Kota;
- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan;
 - k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
 - l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;

- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha perkebunan lintas daerah Kabupaten/Kota;
- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan tata dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- f. Pengoordinasian Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- g. Penyelenggaraan verifikasi konsep hasil kajian penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;

- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantauan, pemantapan distribusi pangan, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi

- penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - q. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
 - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - s. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - t. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. UPTD Balai Benih Pertanian

Balai Benih Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyakan benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;

- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

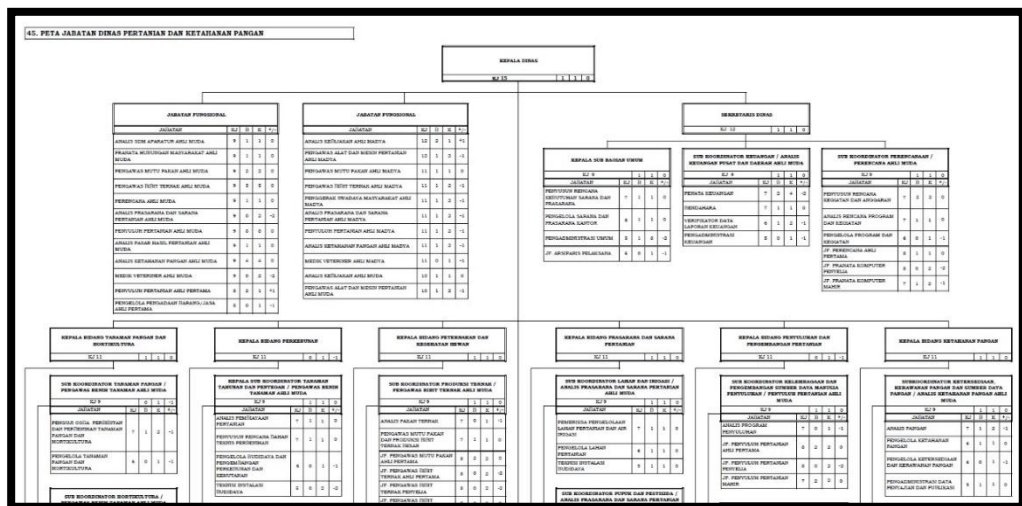
- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- c. Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.2
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ket: Peta Jabatan Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/PetaJabatanDPKP

1.4. Isu-isu Strategis

Ekstistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan”, antara lain sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

1.5. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai perangkat dinas, dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN				PEGAWAI YANG ADA				JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI			JUMLAH	KUALIFIKASI			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
			S2	S1	D3		SMA/SMP	S2	S1			D3
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN												
A	JABATAN STRUKUTRAL											
1	Kepala Dinas	1				1					1	
2	Sekretaris Dinas	1				1					1	
3	Kasubbag Umum	1	1			1	1				1	
4	Kabid Tanaman Pangan dan Holtikultura	1		1		1		1			1	
5	Kabid Perkebunan	1	1			1	1				1	
6	Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan	1		1		1		1				1
7	Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian	1	1			1	1				1	
8	Kabid Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian	1	1			1	1				1	
9	Kabid Ketahanan Pangan	1	1			1	1					1
B	JABATAN FUNGSIONAL											
1	Perencana Ahli Muda	2	2			2	2				1	1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1		1		1		1				1
3	Perencana Ahli Pertama	1		1		1		1			1	
4	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1		1		1		1			1	
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1		1		1		1			1	
6	Pranata Komputer Mahir/ Pelaksana Lanjutan	1			1	1			1		1	

7	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	2	1	1			2	1	1			2	
8	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		1			1		1			1	
9	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	1		1			1		1				1
10	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	1	1				1	1				1	
11	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2		2			2		2			2	
12	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	6	1	4	1		6	1	4	1		4	2
13	Medik Veteriner Ahli Muda	2	1	1			2	1	1			2	
14	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	2	1	1			2	1	1			1	1
15	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	3	1	2			3	1	2			1	2
16	Pengawas Bibit Ternak Mahir/Pelaksana Lanjutan	1			1		1			1		1	
17	Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan	2			2		2			2		1	1
18	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama (P3K)	1		1			1		1			1	
19	Medik Veteriner Ahli pertama	2		2			2		2			1	1
20	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama (P3K)	1		1			1		1				1
21	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	1		1			1		1			1	
22	Analisis Sarana Dan Prasarana Pertanian Ahli Muda	3		3			3		3			2	1
23	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama (P3K)	1		1			1		1			1	
24	Pengawas Bibit Ternak Penyelia	1			1		1			1			1
25	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	1		1			1		1			1	

26	Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Pertama	1		1		1		1				1	
27	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	11	3	8		11	3	8			6	5	
28	Penyuluh Pertanian Penyelia	2			2	2			2			2	
29	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	3		3		3		3			1	2	
30	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama (P3K)	4		4		4		4			4		
31	Penyuluh Pertanian Pelaksana (P3K)	2			2	2				2		2	
32	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	7	1	5	1	7	1	5	1		1	6	
33	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	3	1	2		3	1	2				3	
34	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	1		1		1		1			1		
35	Analisis Kebijakan Ahli Madya	2	2			2	2					2	
36	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	1		1		1		1				1	
37	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	1	1			1	1					1	
38	Analisis Ketahanan Pangan Madya	1	1			1	1				1		
39	Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya	1	1			1	1				1		
40	Pengawas Alat Dan Mesin Ahli Madya	2	1	1		2	1	1			1	1	
41	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya	1	1			1	1					1	
42	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	2	2			2	2				1	1	
43	Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya	1		1		1		1				1	
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Pengadministrasi Umum	4				4	4				4	3	1

2	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1			1		1			1			1
3	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	3		3			3		3			1	2
4	Pengadministrasi Perkantoran (P3K Full Time)	7				7	7				7	2	5
5	Bendahara	1		1			1		1				1
6	Penata Laporan Keuangan	3		3			3		3			1	2
7	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1		1			1		1				1
8	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	2		2			2		2				2
9	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
10	Analisis Pembiayaan Pertanian	1		1			1		1			1	
11	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
12	Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar	1		1			1		1				1
13	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1		1			1		1			1	
14	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
15	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	1		1			1		1			1	
16	Pengelola Lahan Pertanian	1			1		1			1		1	
17	Teknisi Instalasi Budidaya	1				1	1				1	1	
18	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1			1		1			1		1	
19	Pengawas Pupuk dan Pestisida	1		1			1		1			1	
20	Analisis Pangan	5	2	3			5	2	3				5
21	Pengelola Ketahanan Pangan	2			2		2			2			2

D	PPPK PW/PHL													
1	Penata Layanan Operasional	13		13				13		13			6	7
2	Operator Layanan Operasional	34				34	34					34	19	15
3	Pengelola Umum Operasional	2				2	2					2	2	
NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN		
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP			
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN														
A	JABATAN STRUKUTRAL													
1	Kepala UPTD Balai Proteksi Tanaman	1		1			1		1				1	
2	Kasubbag Tata Usaha	1		1			1		1				1	
3	Kepala Seksi Pelayanan Teknis	1		1			1		1					1
B	JABATAN FUNGSIONAL													
1	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	2		2			2		2				1	1
2	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Muda	2		2			2		2				2	
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	2		2			2		2				1	1
C	JABATAN PELAKSANA													
1	Pengadministrasi Umum	1				1	1				1		1	
2	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2		2			2		2				1	1
3	Pengelola Layanan Operasional (P3K Full Time)	2			2		2			2			2	
4	Pengelola Umum Operasional (P3K Full Time)	2				2	2				2		2	

5	Analisis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana	1		1			1		1			1	
D	PPPK PW/PHL												
1	Penata Layanan Operasional	2		2			2		2			1	1
2	Pengelola Layanan Operasional	3			3		3			3		2	1
3	Operator Layanan Operasional	10				10	10		10			6	4
4	Pengelola Umum Operasional	2				2	2				2	2	
NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN													
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala UPTD Balai Benih Pertanian	1	1				1	1				1	
2	Kasi Produksi	1		1			1		1			1	
3	Kasubbag Tata Usaha	1		1			1		1			1	
4	Kasi Sarana Dan Prasarana	1		1			1		1			1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	3	1	2			3	1	2			1	2
2	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	2		2			2		2			2	
3	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1		1			1		1			1	
4	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama (P3K)	1		1			1		1			1	
5	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	1		1			1		1			1	
C	JABATAN PELAKSANA												

1	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1				1	1				1	
2	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	1		1			1		1			1	
3	Pengelola Layanan Operasional (P3K Full Time)	1			1		1			1		1	
4	Pengadmistrasi Umum	3		3			3		3			3	
D	PPPK PW/PHL												
1	Penata Layanan Operasional	4		1		3	4		1		3	3	1
2	Operator Layanan Operasional	12		2	2	8	12		2	2	8	11	1
3	Pengelola Umum Operasional	5				5	5				5	3	2
NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH													
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala UPTD Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih	1		1			1		1			1	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1		1			1		1			1	
3	Kepala Seksi Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit	1		1			1		1			1	
4	Kepala Seksi Pengawasan Benih	1		1			1		1			1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1		1			1		1			1	
2	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	1		1			1		1			1	
3	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	1		1			1		1			1	

4	Pengawas Benih Tanaman Penyelia	1		1			1		1			1	
5	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	4		4			4		4			4	
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1		1			1		1				1
2	Penelaah data Sertifikasi Mutu Benih atau Bibit	1		1			1		1			1	
3	Penelaah Data Sumber Benih	1		1			1		1			1	
4	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	1		1			1		1			1	
5	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1		1			1		1			1	
6	Tugas Belajar	1		1			1		1			1	
D	PPPK PW/PHL												
1	Penata Layanan Operasional	2		2			2		2			1	1
2	Pengelola Layanan Operasional	2			2		2			2		1	1
3	Operator Layanan Operasional	7				7	7				7	2	5
4	Pengelola Umum Operasional	1				1	1				1	1	
NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI-LAKI	PEREMPUAN
S2	S1		D3	SMA/SMP	S2	S1		D3	SMA/SMP				
UPTD PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN													
A	JABATAN STRUKUTRAL												
1	Kepala UPTD Pengawasan Mutu Dan Keamanan Pangan	1		1			1		1			1	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	1				1	1				1	
3	Kepala Seksi Sertifikasi dan Registrasi	1		1			1		1			1	

4	Kepala Seksi Mutu dan Standarisasi	1	1				1	1				1	
B	JABATAN FUNGSIONAL												
1	Pranata Komputer Penyelia	1			1		1			1		1	
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia	1			1		1			1		1	
3	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama	1		1			1		1				1
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	6	3	3			6	3	3			2	4
C	JABATAN PELAKSANA												
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1		1			1		1			1	
2	Pengelola Program dan Kegiatan	1			1		1			1			1
3	Analisis Pangan	1		1			1		1			1	
D	PPPK PW/PHL												
1	Penata Layanan Operasional	2		2			2		2				2
3	Operator Layanan Operasional	2				2	2				2	2	

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 161 orang (52,61%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 37 orang (12,09%), D3 sebanyak 27 orang (8,28%), SLTA sebanyak 71 orang (23,20%), dan SLTP sebanyak 10 orang (3,27%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2
Sarana-Prasarana

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah	Nilai aset (Rp)
1	TANAH	1.059.661 M²	513.354.769
2	PERALATAN DAN MESIN	2.965 Unit	32.580.814.530
	a. Alat-alat Besar	145 Unit	8.863.525.275
	b. Alat-alat Angkutan	71 Unit	6.123.059.500
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	104 Unit	862.539.536
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	135 Unit	2.762.746.963
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.707 Unit	4.595.629.322
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	166 Unit	623.405.214
	g. Alat-alat Kedokteran	69 Unit	206.915.214
	h. Alat-alat Laboratorium	411 Unit	6.043.296.422
	i. Komputer	157 Unit	2.499.697.084
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	58 Unit	30.483.994.380
	a. Bangunan Gedung	55 Unit	30.444.118.380
	b. Bangunan Monumen	3 Unit	39.876.000
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	25 Unit	8.278.816.867
	a. Jalan dan Jembatan	7 Unit	5.076.020.937
	b. Bangunan Air/Irigasi	6 Unit	2.436.804.000
	c. Instalasi	8 Unit	715.838.000
	d. Jaringan	4 Unit	50.153.930
5	ASET TETAP LAINNYA	11.483 Buah	1.929.548.900
	a. Buku Perpustakaan	234 Buah	162.953.900
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	- Buah	400.000
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	11.249 Buah	1.587.120.000
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1 Unit	309.219.000
7	ASET LAINNYA		424.302.750
TOTAL			74.095.748.446

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Kendaraan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II, 10 unit kendaraan operasional jabatan Eselon III, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruangbaca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 50% Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 50% dari komputer/laptop yang ada diproduksi dibawah tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2024	Rp55.147.366.409	-	-	-	Rp55.147.366.409
2025	Rp54.947.145.748	Rp349.171.100	-	-	Rp55.296.316.848

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 dibanding tahun 2024 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 148.950.439,- Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika kegiatan selama kurun waktu 2023–2026.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6.79	6.61	6.94	7.29	7.65	7.65	-
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	24,970.07	25,294.27	26,565.81	27,901.28	29,303.89	29,303.89	-
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	81.10	86.48	87.77	89.09	90.43	90.43	-
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Skor	87.49	80.88	81.29	81.69	82.10	82.10	Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak lagi dilakukan.

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan produktivitas pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
	Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Meningkatkan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian
Peningkatan produksi peternakan	Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian	Meningkatkan pertambahan angka produksi ternak

	Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Menurunkan kasus penyakit hewan menular
Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
	Melakukan penanganan kerawanan pangan	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	Meningkatkan konsumsi pangan B2SA
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakin PD (DPKP)

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10,588,741,773	8,954,288,740	-1,634,453,033
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1,367,000,000	288,173,200	-1,078,826,800
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	9,186,794,120	8,635,968,350	-550,825,770
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	34,947,653	30,147,190	-4,800,463
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,519,000,000	556,404,900	-2,962,595,100
		Penataan Prasarana Pertanian	3,519,000,000	556,404,900	-2,962,595,100
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	512,000,000	363,368,700	-148,631,300
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	512,000,000	363,368,700	-148,631,300
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1,386,060,400	1,298,679,800	-87,380,600

		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,386,060,400	1,298,679,800	-87,380,600
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,044,310,000	1,867,624,300	-176,685,700
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	348,610,000	285,931,900	-62,678,100
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1,695,700,000	1,581,692,400	-114,007,600
2. Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2,155,513,650	2,611,964,550	456,450,900
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	1,455,513,650	1,812,480,450	356,966,800
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	700,000,000	799,484,100	99,484,100
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1,617,687,729	1,078,365,475	-539,322,254
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	646,391,294	401,898,044	-244,493,250
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	425,296,878	306,836,628	-118,460,250
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	545,999,557	369,630,803	-176,368,754
3. Meningkatkan Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	165,999,900	162,313,800	-3,686,100
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	165,999,900	162,313,800	-3,686,100
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	846,486,400	751,090,300	-95,396,100
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	170,487,150	133,434,350	-37,052,800
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	287,999,250	285,412,650	-2,586,600
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	388,000,000	332,243,300	-55,756,700
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	217,497,950	287,586,900	70,088,950
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	55,499,950	39,590,900	-15,909,050
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	161,998,000	247,996,000	85,998,000
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	253,963,189	184,612,719	-69,350,470
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	253,963,189	184,612,719	-69,350,470

4. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42,743,759,055	37,180,016,664	-5,563,742,391
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	148,000,000	82,267,000	-65,733,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33,919,435,840	29,490,443,061	-4,428,992,779
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20,000,000	11,222,500	-8,777,500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66,000,000	54,000,000	-12,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	939,804,715	672,800,265	-267,004,450
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149,616,000	136,519,800	-13,096,200
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,666,222,500	5,414,313,748	-251,908,752
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,834,680,000	1,318,450,290	-516,229,710
TOTAL ANGGARAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SARARAN			66,051,020,046	55,296,316,848	-10,754,703,198

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/PD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/137/Kpts/DPKP-I/2023 (sebagaimana terlampir).

Sedangkan Indikator Kinerja Individu (IKI) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran tujuan yang harus dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Individu sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

2.5.1. Perjanjian Kinerja 2025 Induk

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	7,29	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 7,29
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	29.950	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7.487,5 14.975 22.462,5 29.950
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	90,43	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 90,43

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel II.5
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.058.8741.773	APBD Induk
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.519.000.000	APBD Induk

		Program Penyuluhan Pertanian	2.044.310.000	APBD Induk
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.386.060.400	APBD Induk
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	512.000.000	APBD Induk
2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	2.155.513.650	APBD Induk
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.617.687.729	APBD Induk
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	165.999.900	APBD Induk
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	217.497.950	APBD Induk
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	846.486.400	APBD Induk
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	253.963.189	APBD Induk
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	42.743.759.055	APBD Induk

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.5.2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan Ke-I)

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena dengan dikeluarkannya Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, melalui Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/191/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 yaitu “Agar memenuhi melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan

kebutuhan anggarannya”, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kesatu) Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: BA-001/DPKP/PK/2025 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel II.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	7,29	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 7,29
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	29.950	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7.487,5 14.975 22.462,5 29.950
3.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	90,43	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 90,43

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel II.7
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-I Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	10.282.848.210	APBD Pergeseran I
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.468.163.400	APBD Pergeseran I
		Program Penyuluhan Pertanian	1.759.624.300	APBD Pergeseran I
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.318.679.800	APBD Pergeseran I
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	397.368.300	APBD Pergeseran I

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.108.365.729	APBD Pergeseran I
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.111.880.550	APBD Pergeseran I
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	162.313.800	APBD Pergeseran I
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	197.588.900	APBD Pergeseran I
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	751.092.400	APBD Pergeseran I
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	197.482.719	APBD Pergeseran I
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	41.772.328.455	APBD Pergeseran I

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

2.5.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Perubahan ke-II)

Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reuiu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reuiu dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Anggaran pada lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan Berita Acara Perubahan Perjanjian Kinerja (Kedua) Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: BA-002/DPKP/PK/2025 Perjanjian Kinerja Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel II.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	7,29	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 7,29
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	29.950	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	7.325,97 14.651,95 21.977,92 29.950
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	90,43	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 90,43

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Tabel II.9
Komponen Anggaran Induk pada Perjanjian Kinerja Perubahan Ke-II Kepala Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.954.288.740	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	556.404.900	APBD-P
		Program Penyuluhan Pertanian	1.867.624.300	APBD-P
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.298.679.800	APBD-P
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	363.368.700	APBD-P
2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.078.365.475	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.611.964.550	APBD-P
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	162.313.800	APBD-P
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	287.586.900	APBD-P

		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	751.090.300	APBD-P
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	184.612.719	APBD-P
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program yang tidak termasuk dalam Indikator)	37.180.016.664	APBD-P

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja tidak berubah, namun terdapat perbedaan pada target kinerja PK dengan target kinerja di Renstra karena menyesuaikan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, yaitu “Agar melakukan perbaikan indikator kinerja menggunakan informasi capaian kinerja pada laporan kinerja sebagai dasar penentuan Target tahun selanjutnya, penyesuaian aktivitas strategi untuk mencapai kinerja, dan kebutuhan anggarannya”. Dibandingkan PK awal, anggaran pada PK Perubahan ke-II berkurang 16,28% sehubungan adanya refocusing Program/Kegiatan non prioritas dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Program/Kegiatan prioritas;
2. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV;
3. Mengelola Anggaran Dekonsentrasi yaitu:
 - 3.1 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Ditjen Tanaman Pangan : Rp 32.648.000,-
 - 3.2 Program Dukungan Manajemen Ditjen Tanaman Pangan: Rp 35.000.000,-
 - 3.3 Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian: Rp 146.525.000,-
 - 3.4 Program Dukungan Manajemen Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian: Rp 150.000.000,-
 - 3.5 Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Badan Pangan Nasional: Rp 178.080.000,-

3.6 Program Dukungan Manajemen Badan Pangan Nasional Republik Indonesia: Rp 44.322.000,-

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki website resmi yang dapat diakses, baik oleh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun masyarakat umum dengan alamat <https://distan.babelprov.go.id/>. Di dalam website ini memuat profil lengkap beserta tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu juga ditampilkan beberapa kegiatan terbaru yang telah dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga menu untuk pengaduan, pelayanan masyarakat, dan prosedur pelayanan masyarakat yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seperti Laporan (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat), Informasi Badan Publik, Berita dan Publikasi, serta Sosial Media Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Gambar 2.1.
Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2025.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.	Ton/Ha	6,79	7,02	7,29	6,91	95,65%	Sangat Baik	7.65
2	Peningkatan produksi peternakan.	Indikator: Produksi Peternakan Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton)	Ton	24.970,07	29.923,40	29.950	30.360	101,37%	Sangat Baik	29,303.89
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Formula Perhitungan: Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat	Nilai	81,10	90,3	90,43	92,3	102,07%	Sangat Baik	90.43

4	Meningkatya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	Nilai	87.49	n/a	n/a	n/a	n/a	Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan, maka indikator ini dihapus .	Disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/Dpkp-I Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.
---	---	--	-------	-------	-----	-----	-----	-----	--	---

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan indikator produktivitas pertanian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Produktivitas Pertanian: Nilai rata-rata produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Sawit: 3,2, Durian: 8,4, Alpukat: 8,3, Cabe Besar: 9,5, Cabe Rawit: 3,43, dan Padi: 3,42) = 6,91 Ton/ha

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam dari komoditi Hortikultura (8,4+8,3+9,5+3,43 Ton/Ha), Tanaman Pangan (3,42 Ton/Ha) dan Perkebunan (3,2 Ton/Ha) yang merupakan subsektor pertanian. lalu diambil rata-rata dari penjumlahan masing-masing komoditi. Tahun 2025 capaian kinerja sasaran ini adalah **6.91 Ton/ha** atau sebesar **101.15%** dari target 6.94 Ton/ha. Sumber data diolah dari Angka Sementara (ASEM) Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2025 terhadap sasaran peningkatan produktivitas pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.4
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Produktivitas pertanian	6,94	7,02	101,15	7.29	6,91	95,65%	7.65	90,33

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran produktivitas pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 6,91 Ton/ha, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 95,65% (belum melampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101,15% indikator sasaran Produktivitas Pertanian mengalami penurunan sebesar 5,5%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran akan tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. formula perhitungan indikator ini adalah nilai persentase rata-rata dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan yaitu: terawasinya pupuk subsidi yang beredar 100% (a), terawasinya alsintan yang beredar dari APBD 100 % (b), terlaksananya 1 kali rakor KP3 100% dan jumlah kunjungan ke toko 33,33% (d) dengan formulasi $(a+b+c+d)/4$. Capaian kinerja

untuk indikator ini adalah $(100\% + 100\% + 100\% + 33,33\%)/4 = 83,33\%$ dari target 100% atau sebesar 83.33%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 100%.

b. Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah dengan mengambil rata-rata dari persentase peningkatan luas tanaman pangan dan luas tanaman hortikultura pada tahun berjalan atau $(\text{Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan} + \text{Persentase peningkatan luas tanaman hortikultura})$ dibagi dua. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut $\Sigma \left(\frac{(22,22\%)+(0,4\%)}{2} \right) = 11,31\%$ target 2,5% atau sebesar 452,4%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 3,95%.

c. Persentase peningkatan luas tanam perkebunan, formulasi perhitungan indikator ini adalah Jumlah luas tanam komoditas perkebunan yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan tahun berjalan (n) dengan luas tanam komoditas perkebunan tahun sebelum (n-1), dibagi luas tanam tahun sebelum (n-1) dikali 100%. Komoditi perkebunan yang diintervensi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2025 adalah Komoditi Kelapa Sawit. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1,5%, Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut: $\Sigma \left(\frac{(106971,32)-(104099,42)}{(104099,42)} \times 100\% \right) = 2,76\%$ dari target 1,5% atau sebesar 183,92%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang mencapai angka 1,77%.

d. Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat, perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (n), dikurangi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (n-1), dibagi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(618561)-(589105)}{(618561)} \times 100\% \right) = 5\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 5%.

e. Persentase Peningkatan produksi benih bermutu, formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum (n-1) dibagi jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 2.5%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(33500)-(22000)}{(22000)} \times 100\% \right) = 52,3\%$ dari target 2,5% atau sebesar 2092%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 2,94%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya regulasi teknis dan standar mutu perbenihan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan tanpa pengadaan langsung;
- Optimalisasi peran UPTD dan sumber daya yang tersedia dalam mendukung peningkatan produksi benih bermutu;
- Terjalannya koordinasi dan sinergi dengan kabupaten/kota, pelaku

usaha, dan kelompok tani;

- Pelaksanaan kegiatan berbasis fasilitasi, pembinaan teknis, dan pengawasan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut :

- Kebijakan efisiensi anggaran (budget tagging) menyebabkan sebagian kegiatan program tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Pembatasan kewenangan pengadaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014;
- Terbatasnya ruang intervensi langsung pemerintah provinsi dalam mendorong peningkatan luas tanam tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- Keterbatasan anggaran dan personel dalam pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pertanian lainnya;

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Memperkuat peran pemerintah provinsi sebagai koordinator, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan pertanian lintas kabupaten/kota;
- Mengarahkan program pada kegiatan non-pengadaan, seperti pembinaan, pendampingan, sertifikasi, dan pengawasan mutu sarana pertanian;
- Meningkatkan sinergi perencanaan dan pendanaan dengan APBD kabupaten/kota, APBN, serta kemitraan dengan pihak swasta guna mencapai target indikator yang ditentukan;
- Menyusun perencanaan program yang lebih adaptif terhadap kebijakan efisiensi anggaran dengan fokus pada indikator prioritas.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator kinerja Rasio ketersediaan prasarana pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah (Penjumlahan penyediaan prasarana pertanian/kebutuhan prasarana pertanian) x100%. Capaian indikator adalah $(0/22500 \times 100\%)=0\%$ dari target 3,5% atau dengan persentase capaian sebesar 0%. Persentase Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 3,5%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya dokumen perencanaan daerah (RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD) yang telah memuat kebutuhan prasarana pertanian sebagai dasar penetapan indikator kinerja program;
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan prasarana pertanian yang memadai;
- Ketersediaan data kebutuhan prasarana pertanian yang dihimpun dari kabupaten/kota sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan keterbatasan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan pengadaan prasarana pertanian, khususnya konstruksi jalan usaha tani, pengawasannya, serta pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan).
- Tidak dilaksanakannya kegiatan penyediaan prasarana pertanian pada tahun 2025 berdampak pada tidak adanya realisasi output program;

- Kondisi tersebut mengakibatkan indikator Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian tidak dapat dihitung, sehingga capaian kinerja program tercatat sebesar 0%.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Mengkaji kembali relevansi indikator rasio ketersediaan prasarana pertanian agar lebih terukur dan realistis sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian;
- Melakukan penyesuaian dokumen perencanaan dan indikator kinerja agar selaras dengan perubahan kebijakan, sehingga evaluasi kinerja tetap dapat dilakukan secara akuntabel. Indikator telah dirubah di Renstra PD Tahun 2025-2029.

3. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai indikator dokumen perizinan usaha pertanian. Formula perhitungan adalah jumlah dokumen perizinan usaha pertanian yang dibuat pada tahun berjalan. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Kejelasan regulasi dan kewenangan pemerintah provinsi dalam fasilitasi perizinan usaha pertanian, termasuk yang bersumber dari DBH Sawit;
- Koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta dukungan administrasi dan teknis dalam penyusunan dokumen perizinan;

- Ketersediaan data dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur dan persyaratan perizinan usaha pertanian;
- Dinamika kebijakan pusat terkait perizinan dan pengelolaan DBH Sawit yang berpotensi mempengaruhi proses pelaksanaan program.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha pertanian kepada pelaku usaha;
- Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan sistem perizinan berbasis elektronik;
- Memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya terkait pemanfaatan DBH Sawit.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:

- a. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang disusun pada tahun berjalan. Capaian indikator kinerja adalah 0 dokumen dari target 1 dokumen atau dengan persentase capaian sebesar 0%. Capaian kinerja pada tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yaitu 1 dokumen.
- b. Terkendalinya Bencana Pertanian akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), formula perhitungan indikator ini

adalah jumlah Persentase perbandingan antara target luas lahan (Ha) yang terkendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan realisasi jumlah Luasan (Ha) Bahan Pengendali OPT yang didistribusi dan dimanfaatkan ke Poktan dan Gapoktan. Capaian indikator kinerja ini adalah 3% dari target 3% atau dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2025 ini lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 4,19%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya perangkat teknis pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta dukungan sumber daya aparatur pengendali OPT di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- Terlaksananya koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pemantauan, pengendalian, dan pelaporan kejadian serangan OPT;
- Adanya respons cepat terhadap kejadian serangan OPT melalui kegiatan pengendalian terpadu sehingga luasan lahan terdampak dapat dikendalikan;
- Partisipasi petani dan kelompok tani dalam penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) yang mendukung efektivitas pengendalian di lapangan.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Terjadinya efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang berdampak pada penghapusan kegiatan pendukung penyusunan dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), sehingga indikator tersebut tidak dapat direalisasikan;
- Keterbatasan dukungan anggaran mengakibatkan tidak optimalnya

kegiatan kajian, pengumpulan data, dan penyusunan dokumen perencanaan adaptasi dan mitigasi DPI sektor pertanian;

- Dinamika perubahan iklim yang bersifat fluktuatif menyebabkan kebutuhan intervensi pengendalian bersifat mendesak dan adaptif.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Penyesuaian perencanaan dan penganggaran untuk mendukung penyusunan dokumen DPI (Dampak Perubahan Iklim);
- Penguatan integrasi data iklim, bencana pertanian, dan serangan OPT;
- Peningkatan pendampingan teknis dan penerapan pengendalian hama terpadu. dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah Persentase Jumlah penerapan informasi teknis dan inovasi pertanian yang diterapkan pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 37 penerapan di 37 BPP = $(37/37) \times 100 = 100\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 100%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Kebijakan efisiensi anggaran (*budget tagging*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan sebagian kegiatan pendukung kinerja program tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Rendahnya kesadaran SDM (petani) untuk mempelajari hal-hal baru terutama yang berkaitan dengan teknologi.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan;
- Meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian.

Tabel III.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025 (Sasaran I)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Produktivitas Pertanian: Nilai rata-rata produktivitas komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Sawit: 3,2, Durian: 8,4, Alpukat: 8,3, Cabe Besar: 9,5, Cabe Rawit: 3,43, dan Padi: 3,42) = 6,91 Ton/ha	7.5	7,29	7.67 <i>(***Angka sangat seemetara/ Proyeksi)</i>	6,91	102.27 %	95,65%

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

- Jika dibandingkan dengan target target Nasional, Target indikator Poduktivitas Pertanian berada dibawah Target Nasional.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Produktivitas Pertanian berada dibawah Realisasi Nasional.
- Sebagai kesimpulan capaian indikator Produktivitas Nasional berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 95,65 %. Hal tersebut

disebabkan karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan daerah Sentra Produksi Pertanian.

3.1.1.1. Data Dukung Capaian Produktivitas Pertanian (Indikator ke I) Melalui Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, UPTD Balai Benih Pertanian, UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 288.173.200,-;
- b. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman dengan anggaran sebesar Rp 8.635.968.350,-;
- c. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi dengan anggaran kegiatan sebesar Rp 30.147.190,-.

Gambar III.1
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

2



Kegiatan Pengawasan Mutu,
Penyediaan dan Peredaran
Benih Tanaman

3		<p>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</p>
---	--	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 556.404.900,-.

Gambar III.2
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian</p>



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Perizinan Usaha Pertanian melekat pada Bidang Perkebunan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 521.973.700,-.

Gambar III.3
Dokumentasi Program Perizinan Usaha Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian melekat pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian dan UPTD Balai Proteksi Tanaman. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 363.368.700,-

Gambar III.4
Dokumentasi Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p style="text-align: center;">Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Penyuluhan Pertanian melekat pada Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 285.931.900,-
- b. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp 1.581.692.400,-

Gambar III.5
Dokumentasi Program Penyuluhan Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

3.1.2. Sasaran : Peningkatan produksi peternakan

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan indikator produksi peternakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan adalah sebagai berikut:

Tabel III.6
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produksi peternakan.	Produksi Peternakan	<p>Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton).</p> <p>Produksi Peternakan: Total Produksi Sapi Lokal Tahun 2025 + Total Produksi Ayam Tahun 2025 (1.647 Ton + 28.713 Ton) = 30.360 Ton</p>

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Penjumlahan Produksi ternak yang dihasilkan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja sasaran ini adalah **30.360 Ton** atau sebesar **101.37%** dari target 29.950 Ton. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran peningkatan produksi peternakan pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.7
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Produktivitas pertanian	29.303,89	29.923,40	102,11	29.950	30.360	101,37	29.303,89	103,60

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan Produksi peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 30.360 Ton, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101,37%. (melampaui).
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 102,11% indikator sasaran produksi peternakan mengalami penurunan sebesar 1.49%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator Persentase pertambahan angka populasi ternak, formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka populasi ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelum (n-1), dibagi angka populasi ternak tahun sebelum (n-1), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 5%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(20879)-(19623)}{(19623)} \times 100\% \right) = 6,4\%$ dari target 5% atau sebesar 128,01%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang sebesar 5%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Penyaluran sarana dan prasarana peternakan yang relatif tepat sasaran;
- Peningkatan keberhasilan reproduksi ternak melalui inseminasi buatan dan pengendalian penyakit hewan;
- Partisipasi aktif peternak dalam pengembangan dan pemeliharaan usaha ternak.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Keterbatasan anggaran untuk perluasan cakupan bantuan sarana peternakan;
- Fluktuasi harga pakan ternak yang mempengaruhi biaya produksi peternak;
- Pola pemeliharaan ternak yang masih tradisional di sebagian wilayah.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan pemerataan penyediaan sarana peternakan dan layanan kesehatan hewan;
- Penguatan pendampingan teknis dan edukasi manajemen pemeliharaan ternak;
- Sinergi pendanaan dan penguatan kelembagaan peternak untuk keberlanjutan program.

2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mempunyai Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 2%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1). Capaian indikator kinerja adalah $(60\%-54\%) = 6\%$ dari target 2% atau sebesar 300%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 4%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Adanya pelaksanaan kegiatan inti pengendalian penyakit hewan menular yang tetap berjalan meskipun terjadi rasionalisasi anggaran;
- Koordinasi dan sinergi yang baik antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan terkait dalam penanganan kasus penyakit hewan;

- Respons cepat petugas kesehatan hewan dalam deteksi dini, penanganan, dan pengendalian kasus di lapangan;
- Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Terjadinya rasionalisasi anggaran (*efisiensi/Budget Tagging*) pada APBD Tahun 2025 yang menyebabkan beberapa sub kegiatan pendukung tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Keterbatasan alokasi anggaran berdampak pada cakupan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan;

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Penguatan perencanaan dan penganggaran agar kegiatan prioritas pengendalian penyakit hewan tetap terakomodir secara optimal;
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan dalam pengendalian penyakit hewan menular;
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui pendekatan berbasis risiko dan wilayah rawan penyakit;

Tabel III.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2025 (Sasaran 2)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton). Produksi Peternakan: Total Produksi Sapi Lokal Tahun 2025 + Total Produksi Ayam Tahun 2025 (1.647 Ton + 28.713 Ton) = 30.360 Ton	3,95 Juta Ton	29.950 Ton	4,05 Juta Ton <i>(***Angka sangat seemetara/proyeksi)</i>	30.360 Ton	102,5%	101,37%

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Produksi Peternakan berada dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator produksi peternakan berada dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Produksi Peternakan berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 102,5%. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan daerah Sentra produksi peternakan.

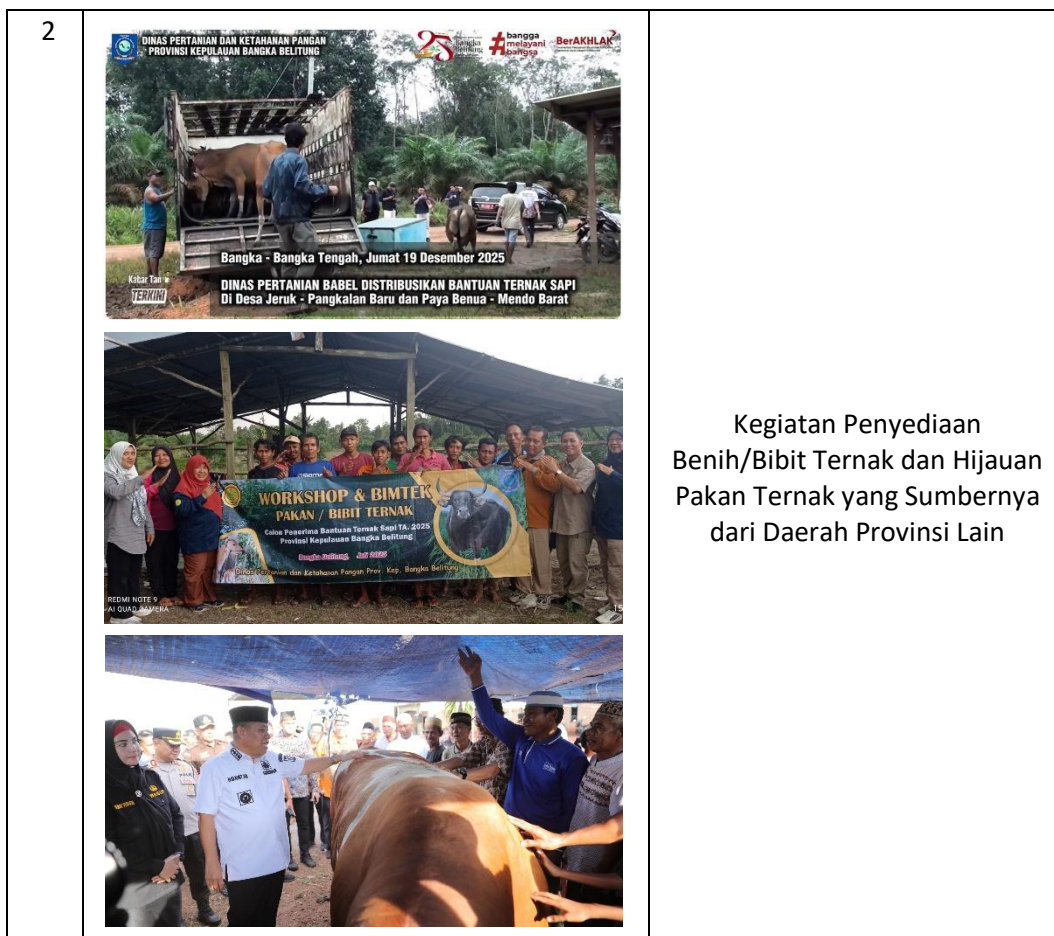
3.1.2.1. Data Dukung Capaian Produksi Peternakan (Indikator ke 2) Melalui Program

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melekat pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan UPTD Balai Benih Pertanian. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan dengan anggaran sebesar Rp 799.484.100,-;
- b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain dengan anggaran sebesar Rp 1.812.480.450,-.

Gambar III.6
Dokumentasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan</p>



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melekat pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 401.898.044,-;
- b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 306.836.628,-;
- c. Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan dengan anggaran sebesar Rp 369.630.803,-

Gambar III.7
Dokumentasi Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	 <p>Bangka, 20 Februari 2025 Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban</p> <p>Bangka, 20 Februari 2025 Pelatihan Penyembelihan Hewan Kurban</p> <p>Pangkalpinang, 23 Mei 2025 Cek Rutin Sapi Kurban Presiden Pastikan Kesehatan Hewan Jelang Idul Kurban</p>	<p align="center">Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>
2	 <p>Pangkalpinang, 05 Maret 2025 Dinas Pertanian Babel Kumpulkan Pelaku Usaha Peternakan Pastikan Stok Daging Sapi dan Telur Ayam Saat Puasa dan Idulfitri</p> <p>Pangkalpinang, 05 Maret 2025 Dinas Pertanian Babel Kumpulkan Pelaku Usaha Peternakan Pastikan Stok Daging Sapi dan Telur Ayam Saat Puasa dan Idulfitri</p>	<p align="center">Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</p>

3		<p>Kegiatan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</p>
---	---	--

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

3.1.3. Sasaran : Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam

Kinerja sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (PPH) Konsumsi yaitu Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	<p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat.</p> <p>Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi tahun 2025 sebesar 92.3</p>

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Kinerja sasaran peningkatan Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan menggunakan formulasi pengolahan data sumbangan energi kelompok pangan Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan DEPTAN tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data Susenas diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH Konsumsi sebesar **92,3** dengan persentase realisasi sebesar **102,07%** terhadap target tahun 2025 yaitu 90,43. Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2024 sebesar 90,3 terjadi peningkatan sebesar 2,07%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.10
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Skor PPH konsumsi	89,09	90,3	101,36	90,43	90,3	102,07	90,43	102,07

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam adalah sebagai berikut:

- a) Tercapai skor PPH Konsumsi sebesar 92,3 dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 102,07% (melampaui);
- b) Dibandingkan persentase capaian tahun lalu sebesar 101.36% indikator

skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan sebesar 0.71%;

- c) Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai indikator persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras). Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah ketersediaan beras tahun berjalan (n) jumlah ketersediaan beras tahun sebelum (n-1) dibagi jumlah ketersediaan beras tahun sebelum (n-1) dikali 100%. Capaian indikator kinerja adalah $\Sigma \left(\frac{(18777,46)-(18301,85)}{(18301,85)} \times 100\% \right) = 2,60\%$ dari target sebesar 2,92% atau persentase capaian sebesar 90%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 2,92%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai dalam mendukung penguatan ketersediaan pangan daerah;
- Pelaksanaan kegiatan penyediaan 1 unit Rice Milling Unit (RMU) yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat;
- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Keterbatasan jumlah sarana pendukung pascapanen yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan wilayah;
- Ketergantungan produksi beras terhadap kondisi cuaca dan musim;

- Kapasitas SDM pengelola RMU yang masih perlu ditingkatkan untuk efisiensi pengelolaan.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan jumlah dan pemerataan sarana pengolahan pascapanen, khususnya RMU di sentra produksi padi;
- Penguatan pembinaan dan pendampingan teknis kepada kelompok pengelola RMU;
- Mendorong integrasi hulu–hilir melalui peningkatan produksi, pengolahan, dan distribusi beras lokal;
- Penguatan sinergi lintas sektor dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan pangan utama daerah.

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formula perhitungan indikator ini adalah Pengolahan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 92,3 dari target sebesar 85,1 dengan persentase capaian 108,46%. Capaian kinerja tahun 2025 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 90,3.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
- Dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah dalam diversifikasi konsumsi pangan;
- Ketersediaan dan stabilitas bahan pangan serta sinergi lintas sektor.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Pola konsumsi masyarakat yang masih didominasi pangan sumber

karbohidrat tertentu;

- Pemanfaatan pangan lokal sumber karbohidrat non-beras yang belum optimal;
- Perbedaan akses dan daya beli masyarakat antarwilayah.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Penguatan edukasi dan kampanye konsumsi pangan B2SA secara berkelanjutan;
- Pengembangan dan promosi pangan lokal unggulan daerah;
- Peningkatan sinergi lintas sektor untuk memperluas akses dan pemanfaatan pangan lokal.

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun awal Renstra. Capaian indikator kinerja adalah $(10 - 11) = -1$ Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar -100%. Daerah rentan rawan pangan meningkat dari 10 kecamatan di Tahun 2024 menjadi 11 kecamatan di Tahun 2025 akibat keterbatasan intervensi program serta pengaruh kondisi ekonomi masyarakat dan kerentanan produksi pangan lokal. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini menurun bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2024 yang sebesar 10 Daerah/Kecamatan.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tersedianya data lintas sektor yang cukup lengkap sebagai bahan penyusunan Peta FSVA;
- Adanya pedoman dan metodologi FSVA nasional sebagai acuan analisis kerentanan pangan daerah;
- Terjalannya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan

dan validasi data pendukung.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Keterbatasan keterkinian dan keseragaman data dari berbagai sumber;
- Perbedaan periode waktu dan format data yang memperlambat proses pengolahan;
- Ketergantungan pada data instansi lain yang berpotensi menyebabkan keterlambatan.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Penguatan integrasi dan pemutakhiran data pangan dan gizi lintas sektor secara berkala;
- Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan data yang akurat dan tepat waktu;
- Pemanfaatan hasil FSVA sebagai dasar perencanaan intervensi penanganan kerawanan pangan yang lebih tepat sasaran.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah bobot pengawasan di peredaran (60%) dijumlahkan dengan bobot registrasi dan sertifikasi (40%) pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator kinerja adalah $((52,1\%)+(40\%)) = 92,1\%$ dari target sebesar 86% atau persentase capaian sebesar 107,09%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dari capaian kinerja tahun 2024 yaitu sebesar 86%.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Tingginya tingkat kesadaran stakeholder/pelaku usaha pertanian untuk mendaftarkan usahanya guna mendapatkan Sertifikat Prima 3;

- Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Terjadinya rasionalisasi anggaran (efisiensi/Budget Tagging) pada APBD Tahun 2025 yang menyebabkan komponen kegiatan pengawasan keamanan pangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal;
- Penggunaan pestisida atau pupuk kimia yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, mengakibatkan produk pertanian yang dihasilkan memiliki kadar kandungan bahan kimia yang tinggi sehingga memiliki risiko yang berdampak pada kesehatan apabila dikonsumsi.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP) untuk meminimalisir penggunaan pestisida dan bahan kimia berbahaya oleh petani;
- Memaksimalkan pengawasan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sebelum diedarkan dipasaran.

Tabel III.11

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja PD dengan Nasional Tahun 2024 (Sasaran 3)

No	Indikator dan Formula Perhitungan	Target Nasional	Target PD	Realisasi Nasional	Realisasi PD	Capaian Nasional	Capaian PD
1.	Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat. Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi tahun 2025 sebesar 92.3	95,1	90,43	94.0	92.3	101.17%	102,07%

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2025

- a. Jika dibandingkan dengan target Nasional, Target indikator Skor PPH Konsumsi berada dibawah Target Nasional.
- b. Jika dibandingkan dengan Realisasi Nasional Target indikator Skor PPH Konsumsi berada dibawah Realisasi Nasional.
- c. Sebagai kesimpulan capaian indikator Skor PPH Konsumsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 92,3 masih berada dibawah capaian Skor PPH Konsumsi Nasional yaitu sebesar 94,0.

3.1.3.1. Data Dukung Capaian Skor PPH Konsumsi (Indikator ke 3) Melalui Program

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan melekat pada Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 162.313.800,-.

Gambar III.8
Dokumentasi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat melekat pada Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan anggaran sebesar Rp 133.434.350,-.
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 285.412.650,-.
- c. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 332243300,-.

Gambar III.9
Dokumentasi Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		<p>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p>

<p>2</p>	 <p>mpingan penyaluran bantuan Pangan di Kelurahan Kudat, Kab Bangka</p> <p>mpingan penyaluran bantuan Pangan di Desa Surya Timur, Kab Bangka</p> <p>Pendampingan penyaluran bantuan Pangan di Desa Rebo, Kab Bangka</p>	<p>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</p>
<p>3</p>	 <p>Pangan Lokal Goes to School SDN 4 Pangkajene Gora</p> <p>Pangan Lokal Goes to School SMPN 1 PANGKALPINANG</p> <p>B2SA Goes to School SMA N 3 Pangkalpinang 18 Juni 2025</p> <p>B2SA Goes to School SDN 15 TOBOALI</p>	<p>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</p>



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Program Penanganan Kerawanan Pangan melekat pada Bidang Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu:

- a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 39.590.900,-.

- b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan anggaran sebesar Rp 247.996.000,-.

Gambar III.10
Dokumentasi Program Penanganan Kerawanan Pangan


No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	 <p>Pangkalpinang, Selasa 9 Desember 2025 RAKOR PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN Acuan Intervensi Program Pembangunan</p> <p>Pangkalpinang, 2 Oktober 2025 BIMTEK PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN Dasar Intervensi Program di Wilayah Rentan Pangan</p>	<p>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</p>
2	 <p>Pangkalpinang, Rabu 3 Desember 2025 PEMERINTAH DAN SPPG SUSUN KEBUTUHAN PANGAN POKOK Sukseskan Program MBG di Babel</p> <p>Pangkalpinang, Rabu 3 Desember 2025 PEMERINTAH DAN SPPG SUSUN KEBUTUHAN PANGAN POKOK Sukseskan Program MBG di Babel</p>	<p>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Program Pengawasan Keamanan Pangan melekat pada UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 184.612.719,-.

Gambar III.11
Dokumentasi Program Pengawasan Keamanan Pangan

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1	 <p>Pangkalpinang, Rabu 26 November 2025 RAPAT TEKNIKS DIKPPD PROVINSI BABEL Tentukan Kelayakan Pelaku Usaha Dapat Sertifikat Keamanan Pangan</p> <p>Pangkalpinang, Rabu 26 November 2025 RAPAT TEKNIKS DIKPPD PROVINSI BABEL Tentukan Kelayakan Pelaku Usaha Dapat Sertifikat Keamanan Pangan</p>	<p align="center">Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

3.1.4. Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP)

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai *good governance*. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.12
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formulasi penjumlahan nilai komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reformasi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator Tahun 2025 **tidak dapat dilakukan/tidak diketahui**. Maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) **tidak lagi digunakan**. Dibandingkan dengan capaian nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2024, capaian nilai RB DPKP tahun 2025 **tidak dapat diperbandingkan**. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) pada tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.13
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 (Sasaran 4)

No	Indikator Sasaran	2024			2025			Target Akhir Renstra (2026) Target	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Nilai RB perangkat daerah (DPKP)	-	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	-	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	-	<i>Indikator tidak lagi digunakan sejak tahun 2023</i>

Sumber : Tim Kerja Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai RB perangkat daerah (DPKP) tahun 2025 tidak diketahui, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target tidak dapat diukur;
- b. Dibandingkan persentase capaian tahun lalu, indikator Nilai RB perangkat daerah (DPKP) tidak dapat diperbandingkan;
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai/tidak dapat diukur.

Capaian Indikator tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mempunyai sasaran tertunjangnya urusan pemerintahan daerah

provinsi dengan indikator:

- a. Nilai sakin PD (DPKP) formula perhitungan indikator ini adalah Penjumlahan nilai fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang didapatkan dari hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/105/LHE/ITDA/2025, Capaian kinerja untuk indikator ini didasarkan penjumlahan dari 4 (empat) komponen penilaian yaitu: 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja, dan 4) Evaluasi Kinerja dengan perhitungan $(23,10 + 24,00 + 12,45 + 19,50) = 79,05$ dari target 81,69 atau sebesar 96,77%. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2024 yang sebesar 78,25.
- b. Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Internal. Formula perhitungan indikator ini adalah rata-rata nilai survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap 4 (Empat) aspek, yaitu: a. Pelayanan keuangan; b. Pelayanan kepegawaian; c. Pelayanan umum; dan d. Penyediaan jasa penunjang; maka didapat nilai rata-rata sebesar 80 dengan kategori "Memuaskan". Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target tahun 2025 yaitu 80. Capaian kinerja pada Tahun 2025 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 yang sebesar 80.

Target indikator program ini dapat tercapai didukung oleh faktor berikut:

- Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- Dukungan Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- Koordinasi sektoral dan lintas sektor yang kondusif sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;

- Ketersediaan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa penunjang;
- Dukungan anggaran untuk Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Target indikator program ini tidak tercapai disebabkan kendala sebagai berikut:

- Revisi anggaran/Refocussing (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di bulan Oktober Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- Kebijakan efisiensi anggaran (*Budget tagging*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kegiatan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyebabkan sebagian kegiatan pendukung kinerja program tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Upaya Perbaikan kedepan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Menindaklanjuti Rekomendasi dari Tim Auditor Inspektorat (APIP) untuk peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kedepan.

3.1.4.1 Data Dukung Capaian Nilai RB perangkat daerah (Indikator ke 4) Melalui Program

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi melekat pada Sekretariat dan UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kegiatan sebagai berikut, yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 82.267.000,-;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 29.490.443.061,-;
- c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 11.222.500,-;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 54.000.000,-;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 672.800.265,-;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 136.519.800,-;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.414.313.748,-;
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1318.450.290,-.

Gambar III.12
Dokumentasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7		<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
8		<p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	7,29	6,91	95,65	Rp 13.040.366.440,-	Rp 11.325.638.317,-	86,85	Rp 1.714.728.123,-
2	Peningkatan produksi peternakan.	Produksi Peternakan	29.950	30.360	101,37	Rp2.563.400.510,-	Rp 3.025.176.488,-	81,98	Rp 665.153.537,-
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90,43	92,3	102,07	Rp 3.690.330.025,-	Rp 1.151.966.902,-	83,14	Rp 233.636.817,-
4	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	-	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	Rp 37.180.016.664,-	Rp 34.294.614.446,-	92,24	Rp 2.885.402.218,-
Total Belanja						Rp 55.296.316.848,-	Rp 49.797.396.153,-	90,06%	Rp 5.498.920.695,-

Sumber : <http://SIPD>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun, Laporan Keuangan Tahun 2025

Berdasarkan tabel III.14 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 55.296.316.848,- terealisasi Rp 49.797.396.153,- atau 90,06% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 5.498.920.695,- atau 9,94%, hal tersebut sesuai dengan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Efisiensi tersebut yang bersumber dari:

- Refocusing kegiatan non prioritas;
- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honor narasumber;
- Efisiensi sewa tempat;
- Efisiensi biaya makanan dan minuman.

3.3. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

Tabel III.15
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 700/105/LHE/ITDA/2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi atas AKIP Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 14 Mei 2025.</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>a) Penginputan dokumen perencanaan Data Kinerja yang dilakukan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;</p> <p>b) Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;</p>	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>a) Melakukan reviu dan penyesuaian antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK) dan indikator kinerja dalam dokumen LAKIP, serta melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pengukuran dan penginputan data kinerja;</p> <p>b) Menyusun dan mensosialisasikan Standard Operating Procedure (SOP) pemantauan capaian kinerja secara berjenjang lingkup unit organisasi perangkat daerah, serta melakukan</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c) Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional; d) Pengukuran Kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; e) Laporan Kinerja sepenuhnya: 1) Dilakukan reuiu berjenjang; 2) Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja; dan 3) Menjadi kepedulian seluruh pegawai; f) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti untuk meningkatkan implementasi SAKIP. 	<p>rapat evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari Ketua tIm kerja, Kepala Bidang hingga Kepala Dinas;</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Mengintegrasikan penilaian kinerja individu (SKP dan evaluasi kinerja lainnya) dalam proses pertimbangan penempatan jabatan, dan melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan BKPSDMD Provinsi terkait penerapan manajemen talenta dan penyesuaian kebutuhan jabatan lingkup OPD; d) Melakukan evaluasi hasil kinerja kegiatan tahun 2024 untuk menjadi dasar efisiensi penyesuaian anggaran kegiatan tahun 2025, serta menyelaraskan indikator kinerja program/kegiatan dengan alokasi anggaran dalam dokumen RKA dan DPA OPD; e) 1) Mengagendakan reuiu internal oleh masing-masing pejabat eselon (Ketua Tim Kerja → Eselon III → Kepala Dinas) terhadap laporan kinerja; 2) Menyertakan analisis faktor penyebab capaian rendah/tinggi serta rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja; 3) Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD; f) Rekomendasi terhadap Hasil Evaluasi atas AKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 berdasarkan surat Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/105/LHE/ITDA/2025 ditindaklanjuti dengan dibuatkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) dan dimonitoring secara berkala untuk meningkatkan implementasi SAKIP Lingkup OPD.
--	---	--

Sumber : Surat Inspektor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/105/LHE/ITDA/2025

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Whatsapp Group (WAG) Kinerja, untuk memudahkan koordinasi mengenai pengembangan/ permasalahan aplikasi kinerja;

b. Inovasi **BABEL LUMPAT** (Bangka Belitung Lumbung Pangan Asal Ternak). BABEL LUMPAT merupakan program yang bertujuan menjadikan Bangka Belitung sebagai Lumbung Pangan Asal Ternak Tahun 2029 dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti peningkatan populasi ternak melalui distribusi bibit/benih, penyiapan pakan/bahan yang berkualitas, peningkatan pelayanan kesehatan hewan, serta fasilitasi pembiayaan, peningkatan kapasitas SDM petugas dan peternak dan dengan pola pendekatan teknologi spesifik lokasi, pemanfaatan sumberdaya lokal dengan sasaran kepada peternak dan masyarakat pada umumnya. Beberapa langkah yang dilakukan untuk memperoleh sasaran yang diharapkan dari inovasi "BABEL LUMPAT" adalah sebagai berikut:

- Identifikasi permasalahan terkait dengan penyediaan pakan, keterbatasan pupuk organik dan tingkat kematian ternak tinggi, serta sumber pakan yang belum termanfaatkan;
- Melakukan perencanaan dari tingkat Desa (kelompok tani), Kabupaten, dan Provinsi serta tingkat Kementerian;
- Seleksi calon kelompok penerima dan distribusi bantuan bibit ternak sapi;
- Sosialisasi pelaksanaan kegiatan rangkaian BABEL LUMPAT;
- Pencegahan, penangulan dan pelayanan kesehatan hewan;
- Melakukan pendampingan teknis dari Dinas Kabupaten, Provinsi, BRIN, Universitas Bangka Belitung;
- Menyiapkan formulasi dan pengolahan pakan bersumber dari perkebunan sawit kelompok, pengawasan perkawinan, kelahiran dan pelayanan kesehatan hewan dan sarana pengolahan pakan sehingga menjadi bank pakan serta teknis pengolahan pupuk organik;
- Penyiapan fasilitasi permodalan usaha penggemukan sapi potong melalui program KUR;
- Fasilitasi asuransi ternak melalui Jasindo.



Publikasi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri tentang Inovasi BABEL LUMPAT dapat diakses melalui Link: https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/141830

3.5. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Terbaik dalam Optimalisasi Penggunaan *Cash Management System* (CMS) Semester I Tahun 2025 (Satker 309168 Tugas Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pangkalpinang tanggal 06 Oktober 2025.



2. Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Klasifikasi Baik Tahun 2024 *(Skor PPH merupakan instrumen penilaian kualitas konsumsi pangan masyarakat). Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia tanggal 14 Oktober 2025.



3. Penghargaan Badan Publik Informatif untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 25 September 2025. Penghargaan diserahkan oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



BAB IV

Penutup

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
3. *Rencana Aksi*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2025, indikator kinerja Produktivitas pertanian tidak tercapai dengan persentase 95,65%, indikator kinerja Produksi Peternakan tercapai dengan persentase 101,37%, dan indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tercapai dengan presentase 102,07%.
2. Sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) dengan indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah tidak dipilih sebagai tolak ukur karena menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) **tidak lagi digunakan**.
3. Tidak tercapainya indikator kinerja Produktivitas Pertanian pada Tahun 2025

disebabkan oleh beberapa faktor utama, baik yang bersifat teknis maupun eksternal. Kondisi iklim yang kurang mendukung, seperti ketidakpastian pola curah hujan dan periode kekeringan pada sebagian wilayah sentra produksi, berdampak pada penurunan hasil panen dan produktivitas komoditas unggulan. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, khususnya jaringan irigasi dan alat mesin pertanian, menyebabkan efisiensi usaha tani belum optimal. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif serta rendahnya adopsi teknologi budidaya oleh petani turut memengaruhi capaian produktivitas. Faktor kelembagaan dan sumber daya manusia, seperti terbatasnya pendampingan penyuluhan dan fluktuasi harga sarana produksi, juga berdampak pada menurunnya minat dan intensitas pengelolaan lahan oleh petani. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut menyebabkan realisasi produktivitas pertanian belum mencapai target yang ditetapkan meskipun berbagai upaya telah dilakukan.

4. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Produksi Peternakan pada Tahun 2025 didukung oleh meningkatnya populasi dan produktivitas ternak melalui pelaksanaan program pengembangan peternakan yang berkelanjutan. Pemberian bantuan sarana produksi ternak, peningkatan akses pakan, serta pengendalian penyakit hewan secara terpadu berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan peningkatan produksi. Selain itu, sinergi yang baik antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan peternak dalam menjaga ketersediaan bibit unggul serta memperkuat manajemen usaha peternakan turut mendorong capaian kinerja melampaui target. Kondisi pasar yang relatif stabil dan meningkatnya permintaan produk peternakan juga menjadi faktor pendukung utama dalam meningkatkan produksi secara berkelanjutan.
5. Tercapainya indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi pada Tahun 2025 menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong pola konsumsi pangan masyarakat yang semakin beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan

yang sehat didukung oleh pelaksanaan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan promosi diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal. Selain itu, terjaganya ketersediaan dan keterjangkauan pangan, khususnya komoditas pangan sumber karbohidrat, protein hewani dan nabati, serta sayur dan buah, berperan penting dalam meningkatkan skor PPH. Sinergi lintas sektor serta dukungan kebijakan ketahanan pangan daerah turut memperkuat capaian indikator ini sehingga realisasi kinerja dapat melampaui target yang ditetapkan.

4.2. Rekomendasi

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Penguatan penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi, melalui demonstrasi plot (demplot) untuk mendorong adopsi inovasi pertanian oleh petani;
2. Perbaikan dan optimalisasi sarana dan prasarana pertanian, khususnya jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta sarana pendukung produksi guna meningkatkan efisiensi usaha tani;
3. Pengendalian risiko iklim dan produksi, melalui penguatan sistem peringatan dini iklim, penyesuaian kalender tanam, serta pengembangan asuransi usaha tani untuk meminimalkan dampak gagal panen;
4. Perlindungan lahan pertanian produktif, melalui penguatan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan pengendalian alih fungsi lahan;
5. Peningkatan kualitas data dan perencanaan produksi, agar penetapan target lebih realistis dan berbasis kondisi riil lapangan;
6. Menjaga kesinambungan pengembangan populasi dan produktivitas ternak, melalui penyediaan bibit unggul, pakan, dan manajemen usaha peternakan;
7. Memperkuat sistem kesehatan hewan dan kapasitas peternak, guna menjaga stabilitas produksi dan mencegah gangguan penyakit ternak;
8. Mendorong penguatan hilirisasi dan pemasaran hasil peternakan, untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan peternak;

9. Meningkatkan edukasi dan promosi konsumsi pangan B2SA, guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas pola konsumsi masyarakat;
10. Mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal, sebagai bagian dari upaya diversifikasi konsumsi pangan;
11. Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan, melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan stabilisasi pasokan pangan daerah.

4.3. Rencana Aksi

Adapun rencana aksi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi budidaya spesifik lokasi melalui demplot dan pendampingan;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana pertanian (irigasi dan alsintan);
3. Penyesuaian kalender tanam dan perlindungan lahan pertanian produktif berbasis data iklim;
4. Penyediaan bibit unggul, pakan ternak, dan pendampingan manajemen usaha peternakan;
5. Penguatan pengendalian dan pencegahan penyakit hewan;
6. Pengembangan hilirisasi dan pemasaran produk peternakan;
7. Edukasi dan kampanye konsumsi pangan B2SA secara berkelanjutan;
8. Pengembangan dan promosi pangan lokal sebagai alternatif pangan utama;
9. Penguatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan pangan daerah;
10. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data;
11. Penyempurnaan perencanaan dan penetapan target kinerja;
12. Peningkatan koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra lima tahun)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6.61	6.94	7.29	7.65
		Peningkatan Produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	25.294,27	26.565,81 <i>(disesuaikan menjadi 29.303,89 karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	27.901,28 <i>(disesuaikan menjadi 30.360 karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	29.303,89
2	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.48	87.77 <i>(disesuaikan menjadi 89,09, karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	89.09 <i>(disesuaikan menjadi 90,43 karena target lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelum)</i>	90.43
3	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80.88 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	81.29 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	81.69 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>	82.10 <i>(disesuaikan, indikator tidak lagi digunakan)</i>

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

Lampiran 2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.4/020/Kpts/DPKP-I
TANGGAL : 20 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET				DEFINISI	FORMULA PERHITUNGAN (RUMUS MENGHITUNG REALISASI TARGET)	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/ha)	6.79	6.61	6.94	7.29	7.65	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditas pertanian.	Total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. (Ton/ha)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perkebunan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian UPTD Balai Benih Pertanian UPTD Balai Proteksi Tanaman UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih
2	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	24,970.07	25,294.27	26,565.81	27,901.28	29,303.89	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.	Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan UPTD Balai Benih Pertanian
3	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	81.10	86.48	87.77	89.09	90.43	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat	Pengolahan data Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dari a) Kelompok Pangan Umbi-umbian b)Kelompok Pangan Kacang-Kacangan c)Kelompok Pangan Buah dan Sayur.	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Ketahanan Pangan UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
4	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	87.49	80.88	81.29	81.69	82.10	Nilai yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai <i>good governance</i> .	Angka yang diperoleh DPKP berdasarkan penilaian APiP dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB).	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Seluruh UPTD Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan

KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EDI KOMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 19701116 199303 1 005

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Induk)



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel.Air Itam Kec.Bukit Intan Pangkalpinang,33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : Distan@babelprov.go.id ; dpkpbabel@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : BA-001/DPKP/PK/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian Berita Acara penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pangkalpinang
Pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Dinas,



Edi Romdhoni, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SUGITO
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN


SUGITO



EDI ROMDHONI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 197011161993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	7,29	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditi pertanian. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	29.950	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90.43	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 10.588.741.773,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3.519.000.000,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 2.044.310.000,-	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 1.386.060.400,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 512.000.000,-	APBD

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.617.687.729,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.155.513.650,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 165.999.900,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 217.497.950,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 846.486.400,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 253.963.189,-	APBD

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan):

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 42.743.759.055,10,-	APBD

Pangkalpinang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



SUGITO

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



EDY ROMDHONI, S.P., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 197011161993031005

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disertai dengan Berita Acara



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang, 33418 Telp./Fax: (0717) – 439492
<https://www.distan.babelprov.go.id> ; Email : Distan@babelprov.go.id ; dpkpbabel@gmail.com

BERITA ACARA

Nomor : BA-005/DPKP/PKP/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Dengan kesepakatan bahwa kolom target pada Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan berpedoman kepada realisasi kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah, yaitu Target kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 harus lebih tinggi dari Capaian kinerja yang ada pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2024 (perubahan sebagaimana terlampir), dan untuk melakukan penyesuaian besaran target kinerja Tahun 2025 berdasarkan kemampuan keuangan/anggaran Perangkat Daerah yang sesuai dengan dokumen Perubahan APBD Tahun 2025.

Demikian Berita Acara Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.



Dibuat di Pangkalpinang
pada tanggal 04 November 2025

Pt. Kepala Dinas,

Erwin Krishawinata, S.TP., M.Si.
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19760130 200212 1 008



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : HIDAYAT ARSANI
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, 04 November 2025

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



HIDAYAT ARSANI

PIHAK PERTAMA,
Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN



ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19760130 200212 1 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	7,29	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman/komoditi pertanian. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Meningkatnya produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	29.950	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	90.43	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat

Anggaran :

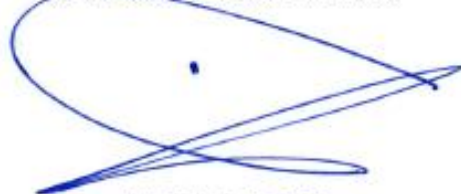
NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 8.954.288.740,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 556.404.900,-	APBD-P
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.867.624.300,-	APBD-P
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 1.298.679.800,-	APBD-P
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 363.368.700,-	APBD-P

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.078.365.475,-	APBD-P
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.611.964.550,-	APBD-P
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 162.313.800,-	APBD-P
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 287.586.900,-	APBD-P
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 751.090.300,-	APBD-P
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 184.612.719,-	APBD-P

Anggaran Penunjang (Kesekretariatan):

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 37.180.016.664,-	APBD-P

PIHAK KEDUA,
 GUBERNUR
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



HIDAYAT ARSANI

Pangkalpinang, 04 November 2025

PIHAK PERTAMA,
 Pjt. KEPALA DINAS PERTANIAN
 DAN KETAHANAN PANGAN



ERWIN KRISNAWINATA, S.TP., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19760130 200212 1 008

Lampiran 5. Laporan Monev Rencana Aksi Tahun 2025 (TW I – TW IV)

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	TW 1: Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alisintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	TW 1: Melakukan Pengawasan Sebaran Pupuk	Pengawasan Sebaran Pupuk telah dilaksanakan	Terawasinya pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alisintan	TW 1: 1 Dokumen	1 Dokumen
				TW 2: Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan			TW 2: Melakukan Pengawasan Sebaran Pestisida	Pengawasan Sebaran Pestisida telah dilaksanakan			TW 2: 2 Dokumen	2 Dokumen
				TW 3: Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			TW 3: Melakukan Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian telah dilaksanakan			TW 3: 3 Dokumen	3 Dokumen
				TW 4: 7,29 Ton/ha	6,91			TW 4: 100%	83,33%			TW 4: 4 Dokumen	4 Dokumen
							Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan & hortikultura	TW 1: Melaksanakan pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah Luas Tanam Tanaman Pangan pada tahun berjalan	TW 1: Persiapan lelang pengadaan benih dan saprodi	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi tanaman Hortikultura
								TW 2: Melaksanakan pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 2: Pemilihan Penyedia, proses kontrak	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak dalam proses pelaksanaan
								TW 3: Melaksanakan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 3: Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan	Masih dalam proses pelaksanaan Pekerjaan
								TW 4: 2,5%	11,31%			TW 4: 250 Ha	2706 Ha
											Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia	TW 1: Persiapan lelang pengadaan benih dan saprodi	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi tanaman Hortikultura
												TW 2: Pemilihan Penyedia, proses kontrak	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak dalam proses pelaksanaan
												TW 3: Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan	Masih dalam proses pelaksanaan Pekerjaan
												TW 4: 50 Ha	50 Ha
										Laporan Produksi benih sumber pertanian (LUPT Balai Benih Pertanian)		TW 1: Penyediaan Pakan Ternak	Penyediaan Pakan Ternak dalam proses pelaksanaan
												TW 2: Penyediaan Vaksin Ternak	Penyediaan Vaksin Ternak dalam proses pelaksanaan

Dokumen lengkap dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/MonevRenaksiDPKP2025>

LAPORAN MONEV RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TRIWULAN II TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	TW 1: Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alisintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	TW 1: Melakukan Pengawasan Sebaran Pupuk	Pengawasan Sebaran Pupuk telah dilaksanakan	Terawasinya pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alisintan	TW 1: 1 Dokumen	1 Dokumen
				TW 2: Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan			TW 2: Melakukan Pengawasan Sebaran Pestisida	Pengawasan Sebaran Pestisida telah dilaksanakan			TW 2: 2 Dokumen	2 Dokumen
				TW 3: Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			TW 3: Melakukan Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian				TW 3: 3 Dokumen	-
				TW 4: 7,29 Ton/ha	-			TW 4: 100%	-			TW 4: 4 Dokumen	-
							Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan & hortikultura	TW 1: Melaksanakan pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah Luas Tanam Tanaman Pangan pada tahun berjalan	TW 1: Persiapan lelang pengadaan benih dan saprodi	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi tanaman Hortikultura
								TW 2: Melaksanakan pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 2: Pemilihan Penyedia, proses kontrak	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak dalam proses pelaksanaan
								TW 3: Melaksanakan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan				TW 3: Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan	-
								TW 4: 2,5%	-			TW 4: 250 Ha	-
											Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia	TW 1: Persiapan lelang pengadaan benih dan saprodi	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi tanaman Hortikultura
												TW 2: Pemilihan Penyedia, proses kontrak	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak dalam proses pelaksanaan
												TW 3: Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan	-
												TW 4: 50 Ha	-
										Laporan Produksi benih sumber pertanian (LUPT Balai Benih Pertanian)		TW 1: Penyediaan Pakan Ternak	Penyediaan Pakan Ternak dalam proses pelaksanaan
												TW 2: Penyediaan Vaksin Ternak	Penyediaan Vaksin Ternak dalam proses pelaksanaan

Dokumen lengkap dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/MonevRenaksiDPKP2025>

LAPORAN MONEV
RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN III TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	TW 1: Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alisintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	TW 1: Melakukan Pengawasan Sebaran Pupuk	Pengawasan Sebaran Pupuk telah dilaksanakan	Terawasinya pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alisintan	TW 1: 1 Dokumen	1 Dokumen
				TW 2: Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan			TW 2: Melakukan Pengawasan Sebaran Pestisida	Pengawasan Sebaran Pestisida telah dilaksanakan			TW 2: 2 Dokumen	2 Dokumen
				TW 3: Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			TW 3: Melakukan Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian telah dilaksanakan			TW 3: 3 Dokumen	3 Dokumen
				TW 4: 7.29 Ton/ha	-			TW 4: 100%	-			TW 4: 4 Dokumen	-
							Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan & hortikultura	TW 1: Melaksanakan pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah Luas Tanam Tanaman Pangan pada tahun berjalan	TW 1: 1 Dokumen	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi
								TW 2: Melaksanakan pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 2: 2 Dokumen	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak
								TW 3: Melaksanakan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 3: 3 Dokumen	Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan
								TW 4: 2,5 %	-			TW 4: 250 Ha	-
											Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia	TW 1: 1 Dokumen	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi
												TW 2: 2 Dokumen	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak
												TW 3: 3 Dokumen	Masih dalam proses pelaksanaan Pekerjaan
												TW 4: 4 Dokumen	-
										Laporan Produksi benih sumber pertanian (UPTD Balai Benih Pertanian)		TW 1: 1 Dokumen	Penyediaan Pakan Ternak dalam proses pelaksanaan
												TW 2: 2 Dokumen	Penyediaan Vaksin Ternak dalam proses pelaksanaan

Dokumen lengkap dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/MonevRenaksiDPKP2025>

LAPORAN MONEV
RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	Capaian	Sasaran Program (PK es 3 /Fungsional)	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Produksi Pertanian	Meningkatnya produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	TW 1: Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dalam proses pelaksanaan	Tersedianya dan berkembangnya sarana pertanian	Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alisintan dan sarana pendukung peningkatan produksi	TW 1: Melakukan Pengawasan Sebaran Pupuk	Pengawasan Sebaran Pupuk telah dilaksanakan	Terawasinya pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alisintan	TW 1: 1 Dokumen	1 Dokumen
				TW 2: Melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan	Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian dalam proses pelaksanaan			TW 2: Melakukan Pengawasan Sebaran Pestisida	Pengawasan Sebaran Pestisida telah dilaksanakan			TW 2: 2 Dokumen	2 Dokumen
				TW 3: Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian			TW 3: Melakukan Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Sarana Pendukung Pertanian telah dilaksanakan			TW 3: 3 Dokumen	3 Dokumen
				TW 4: 7.29 Ton/ha	6.91			TW 4: 100%	83,33%			TW 4: 4 Dokumen	4 Dokumen
							Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan & hortikultura	TW 1: Melaksanakan pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan	Terlaksananya pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman	Jumlah Luas Tanam Tanaman Pangan pada tahun berjalan	TW 1: 1 Dokumen	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi
								TW 2: Melaksanakan pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pengawasan penyediaan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 2: 2 Dokumen	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak
								TW 3: Melaksanakan peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peredaran benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam proses pelaksanaan			TW 3: 3 Dokumen	Proses Pekerjaan, Serah Terima, Pencairan
								TW 4: 2,5 %	11,31%			TW 4: 250 Ha	2706 Ha
											Jumlah Luasan Benih/Bibit Hortikultura yang tersedia	TW 1: 1 Dokumen	Telah dilakukan Persiapan lelang penyediaan benih dan saprodi
												TW 2: 2 Dokumen	Pemilihan Penyedia dan proses kontrak
												TW 3: 3 Dokumen	Masih dalam proses pelaksanaan Pekerjaan
												TW 4: 4 Dokumen	-
										Laporan Produksi benih sumber pertanian (UPTD Balai Benih Pertanian)		TW 1: 1 Dokumen	Penyediaan Pakan Ternak dalam proses pelaksanaan
												TW 2: 2 Dokumen	Penyediaan Vaksin Ternak dalam proses pelaksanaan

Dokumen lengkap dapat dilihat melalui link: <https://bit.ly/MonevRenaksiDPKP2025>

Lampiran 6. Tindakan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2025

TINDAKLANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024

No. LHE : 700/105/LHE/ITDA/2025

Nilai Hasil Evaluasi : 79.05

Tingkat Akuntabilitas Kinerja : BB (Sangat baik)

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	TARGET	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN/OUTPUT	REALISASI				LINK BUKTI DUKUNG
						TARGET TW I	TARGET TW II	TARGET TW III	TARGET TW IV	
1	Penginputan dokumen perencanaan Data Kinerja yang dilakukan relevan dan mendukung untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	Melakukan reviu dan penyeselarasan antara dokumen perencanaan (Renstra, Renja, PK) dan indikator kinerja dalam dokumen LAKIP, serta melakukan monitoring dan evaluasi triwulanan terhadap pengukuran dan penginputan data kinerja	6 Dokumen	Maret s.d Desember	Telah dilakukan reviu dan penyeselarasan Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja-P, PK Perubahan, Laporan Monev Bulanan & Triwulanan)	1	1	3	1	https://drive.google.com/drive/folders/1_gwKpbxc-0Xh76YKQXF1IomGaMKJ9?usp=sharing
2	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang	Menyusun dan mensosialisasikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pemantauan capaian kinerja secara berjenjang lingkup unit organisasi perangkat daerah, serta melakukan rapat evaluasi kinerja secara berjenjang mulai dari Ketua tim kerja, Kepala Bidang hingga Kepala Dinas.	1 Dokumen	Agustus	Telah disusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Secara Berjenjang lingkup OPD Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan	-	-	1	-	https://drive.google.com/drive/folders/1Tw9HWSpgvqc5RxtaA2ZMYA4yAdAwpxX7usp=sharing
3	Pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional	Mengintegrasikan penilaian kinerja individu (SKP dan evaluasi kinerja lainnya) dalam proses pertimbangan penempatan jabatan, dan melakukan koordinasi dengan Biro Organisasi dan BKPSDMD Provinsi terkait penerapan manajemen talenta dan penyesuaian kebutuhan jabatan lingkup OPD.	1 Dokumen	Mei	Dokumen Analisa Kebutuhan Jabatan lingkup OPD telah disampaikan ke Biro Organisasi dan BKPSDMD Provinsi	-	1	-	-	https://drive.google.com/drive/folders/1kpc5u0ngwvWt10bAwck34l6rJ3WVWw7usp=sharing
4	Pengukuran Kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja dan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Melakukan evaluasi hasil kinerja kegiatan tahun 2024 untuk menjadi dasar efisiensi penyesuaian anggaran kegiatan tahun 2025, serta menyalurkan indikator kinerja program/kegiatan dengan alokasi anggaran dalam dokumen RKA dan DPA SKPD.	4 Dokumen	Januari s.d September	Telah dilakukan evaluasi dan Penyesuaian anggaran di RKA & DPA (Telah terbit), RKPA, dan DPPA (Penyesuaian pada ABT/Pergeseran II Tahun 2025)	2	-	2	-	https://drive.google.com/drive/folders/14MnpQBm31RGS0x5Vp7m0AIVEnlsW207usp=sharing
5	Laporan Kinerja sepenuhnya: 1) Dilakukan reviu berjenjang; 2) Menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja; dan 3) Menjadi kepedulian seluruh pegawai	1) Mengagendakan reviu internal oleh masing-masing pejabat eselon (Ketua Tim Kerja → Eselon III → Kepala Dinas) terhadap laporan kinerja; 2) Menyertakan analisis faktor penyebab capaian rendah/tinggi serta rekomendasi perbaikan dalam laporan kinerja; 3) Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.	6 Dokumen	Maret s.d Desember	Telah dilakukan Reviu atas laporan pengendalian dan evaluasi (DALEV) triwulanan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKPI dan LKJIP) Tahun 2025 dilaksanakan mulai Bulan Desember	1	1	1	3	https://drive.google.com/drive/folders/1_PKZ6AX8ZW8tkM4P9k4crohR8Fggp0H7usp=sharing

Lampiran 7. Scan Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025





**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**